

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan harapan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang semakin cepat maka akan semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam artian kebutuhan yang berhubungan dengan pencapaian berbagai indikator pembangunan seperti halnya pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. (Khuldun 2006)

Pembangunan secara umum di Indonesia seharusnya menjadi lebih baik dan lebih mudah apalagi dengan di berlakukannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah daerah, dan menjadi keunggulan tersendiri dimana seharusnya Kemampuan aparatur pemerintah daerah, baik di dalam menyusun rencana pembangunan maupun pelaksanaannya harus lebih meningkat. Hal tersebut lebih dimantapkan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, tentang penyempurnaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)(Hening 2006)

Namun kenyataan yang terjadi dalam pembangunan di negara Indonesia tidak seperti itu dalam artian tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat, karna pada kenyataannya pembangunan nasional belum merata dan masih tidak dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia seperti masyarakat pedalaman yang belum tersentuh pembangunan nasional

terutama masyarakat yang berada di daerah pesisir, meskipun kadang mudah di sentuh pembangunan dalam artian dekat dengan wilayah pusat pembangunan namun terkadang kenyataannya adalah masyarakat di daerah pesisir sebagian besar belum merasakan hasil dari meningkatnya pembangunan nasional, dan itu berarti pembangunan belum sepenuhnya merata ke wilayah pesisir. Sedangkan pesisir juga merupakan wilayah pembangunan yang perlu diperhatikan, dimana pesisir memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan juga banyak kekayaan alam di wilayah pesisir yang mana bila diolah dengan baik maka akan menghasilkan pendapatan daerah yang cukup besar (Rahardjo 2010).

Mengulas sedikit tentang wilayah pesisir dan potensi yang di miliki, tidak ada definisi yang baku tentang pesisir namun menurut Duhari at, al. (1996) pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan alutan, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih di pengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sidementesi dan aliran air tawar. Untuk kekayaan alam atau sumber daya yang di miliki di daerah pesisir yang juga merupakan potensi-potensi pembangunan sebagai berikut (rahardjo 2010):

1. Sumber daya dapat di perbaharui meliputi:
 - a. Hutan mangrove
 - b. Terumbu karang
 - c. Padang lamun dan rumput laut
 - d. Sumber daya perikanan laut
2. Sumber daya tidak dapat di perbaharui yang meliputi mineral dan ekologi
3. Jasa-jasa lingkungan

Jika melihat paparan di atas menunjukkan begitu banyaknya potensi atau kekayaan alam yang ada di wilayah pesisir yang perlu di olah dan di kembangkan sebagai potensi bagi pembangunan nasional pada umumnya karna potensi yang ada di wilayah pesisir tersebut bisa di jadikan sumber pendapatan yang cukup besar terutama di wilayah pesisir.

Menurut Budi (2001) ada beberapa alasan sehingga wilayah pesisir menjadi nomor dua setelah daratan atau kurang dioptimalkan pemanfaatannya:

1. Pemerintah dan masyarakat masih mengutamakan eksploitasi daratan
2. Teknologi eksploitasi dan eksplorasi lautan memerlukan tingkat teknologi yang tinggi
3. Kualitas SDM yang terlibat dalam sektor kelautan masih rendah
4. Sektor kelembagaan yang belum mendukung

Beberapa hal tersebut juga menjadi alasan bagaimana pentingnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah pesisir.

Ada beberapa isu penting yang terjadi di wilayah pesisir akibat dari tidak meratanya pembangunan di wilayah pesisir di antaranya seperti yang di sampaikan oleh bagus (1999) dalam tulisannya memaparkan tentang beberapa isu

prioritas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di wilayah selatan Jatim, didapat temuan-temuan sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas SDM termasuk juga pendapatan atau daya beli masyarakat pesisir yang berarti indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah pesisir belum berhasil
2. Sarana dan prasarana belum memadai tergambar dalam bentuk infrastruktur wilayah pesisir yang masih jauh dari pencapaian terbaik
3. Rendahnya penataan dan penegakan hukum dimana tidak ada kesiapan lembaga dalam pengaturan masyarakat daerah pesisir sehingga tingkat kejahatan lebih tinggi
4. Kerusakan lingkungan wilayah pesisir terutama kebersihan wilayah pesisir sehingga sebagian besar pesisir Nampak kumuh dan tidak terawat
5. Potensi wilayah pesisir belum di kembangkan dan di dimanfaatkan secara optimal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat

Ada beberapa acuan Undang-undang yang melandasi sehingga menjadi pentingnya penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut yang tentunya berkaitan dengan wilayah pesisir yaitu:

1. undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Jika berbicara pesisir pesisir pada umumnya sumber utama pendapatan masyarakat wilayah pesisir berasal dari sektor perikanan baik perikanan budi daya dan perairan umum atau perikanan tangkap karna sebagian besar masyarakat yang hidup di wilayah pesisir adalah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan . Masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dan

berpenghasilan sebagai nelayan merupakan salah satu dari kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapat penghasilan bersumber dari kegiatan nelayan itu sendiri. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dan binatang air lainnya/tanaman air. Tingkat kesejahteraan nelayan ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin pula besarnya pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga atau kebutuhan fisik minimum(KFM) ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya (sujarno 2008).

Para nelayan melakukan pekerjaannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan demi kebutuhan hidup. Untuk pelaksanaannya diperlukan beberapa perlengkapan dan dipengaruhi pula oleh banyak faktor guna mendukung keberhasilan kegiatan. Menurut Salim (1999) faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan meliputi faktor sosial dan ekonomi yang terdiri dari besarnya modal, jumlah perahu, jumlah tenaga kerja, jarak tempuh melaut dan pengalaman. Dengan demikian pendapatan nelayan berdasarkan besar kecilnya volume tangkapan, masih terdapat beberapa faktor-faktor yang lain yang ikut menentukannya yaitu faktor sosial dan ekonomi selain diatas.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional yang dilakukan melalui Pembangunan Nasional terpadu dan menyeluruh maka pembangunan sektor ekonomi mutlak diperlukan yaitu pembangunan ekonomi yang berimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemajuan pertanian yang tangguh dengan sasaran untuk menaikkan tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kehidupan untuk

lebih sejahtera dilakukan dengan peningkatan setiap produk yang dihasilkan sektor kegiatan ekonomi.

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya dengan rencana kebijaksanaan pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor perikanan, bertujuan untuk :

1. Meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan baik untuk memenuhi pangan, gizi dan bahan baku industri dalam negeri serta ekspor hasil perikanan.
2. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan nelayan.
3. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta menunjang pembangunan daerah
4. Meningkatkan pembinaan kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan hidup.

Dengan kenyataan tersebut maka sudah sewajarnya apabila potensi sumberdaya perikanan yang ada dikembangkan penangkapannya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memelihara dan menjaga kelestarian sumberdaya perikanan ini, disamping memperhatikan faktor-faktor yang menunjang perolehan produksi nelayan tersebut (sujarno 2008).

Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang sebagian besar daerahnya berbatasan dengan wilayah pesisir dan Bangkalan juga masih di kenal dengan daerah yang perkembangan dan pertumbuhan ekonominya masih rendah atau sedikit lambat. Bisa juga di kategorikan sebagai daerah yang tertinggal dibandingkan dengan kawasan Gerbangkertasusila lainnya. Perekonomian Kabupaten Bangkalan didominasi oleh sektor primer yang berbasis

pada sumber daya alam, termasuk perikanan tangkap seperti nelayan. Menonjolnya dominasi sektor tersebut disebabkan karena nilai tambah sektor tersebut berasal dari produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam (*Resource Base Oriented*)

Bangkalan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang sebagian wilayahnya di batasi oleh pesisir atau perairan laut di mana Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sampang., Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura, sebagian besar Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan berbatasan dengan perairan laut atau bisa dikatakan kawasan pesisir, yang jauh dari pesisir bahkan letak serta tingginya jauh dari permukaan laut hanya 5 Kecamatan saja yaitu konang, galis, tanah merah, geger dan kokop saja, sedangkan 13 Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bangkalan adalah wilayah yang memiliki letak dan tinggi yang dekat dengan kawasan pesisir (BPS Bangkalan 2010).

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan cenderung meningkat hingga tahun 2007 dan pada akhirnya kontribusi perikanan terhadap PDRB tersebut mulai turun hingga tahun 2009, meskipun demikian yang terjadi, akan tetapi tingkat pertumbuhan produksi ikan di Kabupaten Bangkalan belum berarti karna pertumbuhan produksi perikanan semakin meningkat namun kontribusinya terhadap PDRB kalah dari sektor pertanian yang lain, penyebab belum berartinya tersebut jika dibandingkan dengan kondisi potensi dan teknologi yang digunakan

Tabel 1.1.

**Kontribusi Sub Sektor Serikanan Terhadap PDRB
Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2009**

Tahun	Jumlah Rp	Kontribusi Terhadap PDRB (%)
2005	63930.25	6.40%
2006	65688.33	6.42%
2007	69286.89	6.71%
2008	70012.5	6.31%
2009	72299.77	6.21%

Sumber: Kabupaten Bangkalan dalam angka, 2010

Meskipun sub sektor perikanan mampu bertahan dalam menghadapi krisis tahun 1998-1999, namun berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kontribusi relatif sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan pada 2 tahun terakhir.

Namun, dengan memperhatikan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap (penangkapan ikan laut + penangkapan perairan umum) tahun 2008 sebesar 23453.86 ton dan naik menjadi 23687.3 ton pada tahun 2009 atau dengan kata lain mengalami peningkatan sebesar 1.7%. Secara total produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bangkalan masih tetap dominant dibandingkan dengan produksi perikanan budi daya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 1.2, sebagai berikut :

Tabel 1.2.

**Perkembangan Produksi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangkalan
Dalam Ton Tahun 2008-2009**

Nomor	Sumber Produksi	Tahun	
		2008	2009
1	Perikanan Tangkap	23453.86	23687.3
2	Perikanan Budi Daya	1544.86	1570.8
Total		24998.72	25258.1

Sumber: dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bangkalan tahun 2010

Penelitian ini ingin mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan yang di fokuskan kepada nelayan ikan tangkap yaitu modal tenaga kerja, tenaga kerja, waktu melaut, pengalaman dan jarak tempuh melaut.

Pada dasarnya banyak hal yang dapat mempengaruhi pendapatan secara umum, termasuk juga bidang pekerjaan yang digeluti serta tingkat pendidikan masyarakat, lalu bagaimanakah dengan wilayah pesisir Bangkalan, factor-faktor apa sajakah yang dominan mempengaruhi pendapatan nelayan di wilayah pesisir Bangkalan? Untuk mengetahui hal tersebut menjadi pentingnya masalah ini untuk diteliti dengan menggunakan acuan serta alasan yang sudah dipaparkan sebelumnya di atas.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di sampaikan di latar belakang dari bagaimana pentingnya pembangunan serta indicator pencapaiannya terutama Bangkalan yang umumnya masih lemah pembangunan dan sebagian besar

kawasannya berbatasan dengan pesisir, serta didasarkan acuan undang-undang yang tercantum di latar belakang. maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh modal kerja terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Bangkalan.
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Bangkalan.
3. Bagaimana pengaruh pengalaman terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Bangkalan.
4. Bagaimana pengaruh jarak tempuh melaut terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Bangkalan..

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Bangkalan.
4. Untuk mengetahui pengaruh jarak tempuh melaut terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini terutama bagi peneliti sendiri, dan tidak ketinggalan juga bagi pemerintah dan masyarakat sebagai actor pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah yaitu sebagai wawasan, ilmu pengetahuan ekonomi terutama pemahaman teori produksi dan pendapatan.
2. Manfaat kebijaksanaan yaitu diharapkan, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan perikanan, hususnya dalam meningkatkan produksi dan pendapatan.